

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy P. Hamzah, N. A. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021, November 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51 Persen (y-on-y)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/>
- Bahtiar Arif, M. I. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basith, A. (2020, 4 14). *Sri Mulyani: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terbit karena kondisi luar biasa*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/>
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Carl S. Warren, J. M. (2009). *Accounting 23e*. Mason: South-Western Cengage Learning.
- CNN Indonesia. (2020, 12 4). *Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan di Wuhan*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Indonesia.go.id. (2020, Maret 2). *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. Diambil kembali dari indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018, Juni 6). Diambil kembali dari <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/ende/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837>: <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/ende/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-permohonan-dispensasi-keterlambatan-pendaftaran-data-kontrak-masih-menumpuk.html>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/profil/sejarah.html>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). *Standar Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- MacIver, R. M. (1992). *Modern State*. Oxford: Oxford University Press.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Sebayang, R. (2020, 3 12). *WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.